

UPAYA KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

Tifani Ardilah, Mochamad Makmur, Imam Hanafi

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: fanny.ardilah@yahoo.com

Abstract: *Efforts To Improve The Village Head of Public Participation in Rural Development (Study in Bareng Village Bareng District of Jombang Area):* In this era of globalization phenomena of development are increasingly faced with the problem gets more complex, it is to realize the concept of a just and prosperous society based on Pancasila Act of 1945 is not an easy thing in its implementation. One of the highlights for the study is the village head Efforts to Increase Public Participation in Rural Development. The purpose of the study is to describe and analyze the efforts made by the Village Head Bareng to increase community participation in rural development and the constraints faced by the Village Head Bareng to increase community participation in rural development. This research uses descriptive qualitative method. The focus of the study: (1) Efforts to Improve the Village Head of Public Participation in Rural Development, (2) Community Participation in Rural Development, (3) the constraints faced by the village chief to increase community participation in rural development. While the obstacles faced by the village chief to increase participation in development include: internal constraints and external constraints. From the research it can be concluded that the level of income and education possessed by a society will affect their level of participation in rural development.

Keywords: *village head, community participation, rural development*

Abstrak: **Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang):** Di era globalisasi ini fenomena pembangunan dihadapkan pada permasalahan yang semakin hari bertambah kompleks, maka untuk mewujudkan konsep masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian: (1) Upaya Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, (3) Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan kendala yang dialami kepala desa untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan meliputi: kendala internal dan kendala eksternal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan dan pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa.

Kata kunci: kepala desa, partisipasi masyarakat, pembangunan desa

Pendahuluan

Di era globalisasi ini fenomena pembangunan dihadapkan pada permasalahan yang semakin bertambah kompleks, maka untuk mewujudkan konsep masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Agar pembangunan

nasional dapat mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, maka diperlukan adanya keterlibatan seluruh komponen bangsa secara proporsional.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan

bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan makna pembangunan desa menurut Dirjen PMD (1996, hal. 4) bahwa: "Seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kelurahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dari masyarakat".

Dengan demikian maka untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin formal yang berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ada di desa, berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Dengan demikian Kepala Desa harus mampu berperan sebagai motivator, komunikator serta mampu membina organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian perhatian utama harus diberikan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Tjokroamidjojo (1995, hal. 225) mengenai partisipasi masyarakat adalah: "Di satu pihak partisipasi penting bagi pembangunan, dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Di lain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi".

Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan itu tidak berarti dan sudah tidak pasti akan mencapai sasaran yang dituju. Pembangunan tanpa dukungan atau partisipasi masyarakat adalah suatu usaha yang sia-sia karena tidak akan efektif.

Di dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng, didalam memberikan motivasi agar warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan diberikan dengan bentuk memberi arahan, binaan atau penyuluhan kepada masyarakat

tentang arti penting pembangunan desa bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Namun, pada kenyataannya masyarakat masih menunggu Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah untuk kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini yaitu: (1) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, (3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kedua, mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa. Ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Desa

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karena dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraannya.

Pengertian Pembangunan Desa sebagaimana seperti yang dikutip oleh penulis berdasarkan dari pernyataan Adisasmita (2006, hal. 4) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional,

pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional nantinya.

2. Konsep Dasar Partisipasi

Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun untuk itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien.

3. Kepala Desa Dalam Organisasi Pemerintahan

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang secara langsung dicalonkan oleh masyarakat setempat ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota atas nama Gubernur. Kepala Desa mempunyai tugas yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah (1) Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, (2) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, (3) Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Lokasi penelitian ini adalah Wilayah Desa Bareng Kecamatan Bareng

Kabupaten Jombang dan situs penelitian yaitu Kantor Kepala Desa. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan analisis interaktif, dalam Miles dan Huberman (1994) terdapat 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Pembahasan

1. Upaya Kepala Desa Bareng Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

a. Memberikan Motivasi

Motivasi dalam hal pembangunan desa sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Seorang Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Motivasi adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Siagian, 2007, hal.106).

Seperti halnya dengan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa Bareng telah melaksanakan peranannya sebagai administrator pembangunan yang salah satunya yaitu pemberian motivasi kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi di dalam membangun desanya. Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng kepada masyarakatnya ialah berupa motivasi secara sosial, fisiologis maupun motivasi pemberian semangat dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa.

b. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan.

Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Kepala

Desa Bareng dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat desa yang bertempat di kantor desa dengan mengundang perwakilan desa seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, LKMD, BPD dan perangkat desa. Rapat ini dilakukan untuk membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng.

c. Melaksanakan Tugas Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi di dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, apakah di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Kaitannya dengan itu, Kepala Desa Bareng di dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desanya, dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

a. Perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2003, hal. 88)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena demi suksesnya pembangunan dan pencapaian hasil yang baik membutuhkan perencanaan yang matang untuk mendukung keberhasilan tersebut. Partisipasi masyarakat Desa bareng dalam hal perencanaan yang akan dibahas di sini bukanlah masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi melalui wakil-wakilnya baik yang berada dalam kepengurusan LKMD maupun tokoh-tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui perwakilannya dalam hal perencanaan diwujudkan dalam sebuah forum seperti rapat/musyawarah yang membahas tentang rencana atau program-program yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng.

b. Pelaksanaan

Partisipasi ini diwujudkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa, seluruh masyarakat hendaknya dilibatkan dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan di desanya tanpa kecuali,

pembangunan yang dimaksud disini mencakup pembangunan fisik desa tersebut. Pembangunan fisik disini berupa pembangunan fasilitas-fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada di desa. Partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam pelaksanaan pembangunan di desanya diwujudkan dalam bentuk swadaya tenaga dan swadaya uang.

c. Pengawasan

Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2007, hal. 112). Kegiatan pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Di dalam pembangunan desa, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pemerintah desa, tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat desa selaku pelaksana pembangunan. Partisipasi masyarakat Desa Bareng dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa sudah cukup baik karena semua ikut andil, semua masyarakat mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut.

d. Evaluasi

Kegiatan evaluasi jika dikaitkan dengan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan, karena kegiatan ini untuk mengetahui apakah pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana sebelumnya ataukah belum. Kegiatan evaluasi juga penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan pembangunan tersebut, dan apabila terjadi kekurangan-kekurangan maka akan diperbaiki untuk kesempurnaan. Dengan kata lain evaluasi adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir, atau dengan kata lain evaluasi ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang seharusnya dicapai (Siagian, 2003, hal. 117).

Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bareng, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tidak sebatas pada perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan saja, akan tetapi mereka selalu bertanggung jawab akan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi terhadap pembangunan yang ada di desanya, baik dalam mengikuti rapat

evaluasi pelaksanaan pembangunan maupun dalam kegiatan pekerjaan perbaikan hasil dari pembangunan tersebut.

e. Memelihara Hasil-hasil pembangunan

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam hal ini yaitu diharapkan masyarakat ikut menjaga dan memelihara semua hasil pembangunan di desanya dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya merusak. Semua masyarakat desa hendaknya dapat memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik, namun tidak hanya sebatas memanfaatkannya, tetapi juga ikut menjaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

Sesuai dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang ada di Desa Bareng telah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat secara keseluruhan, kegiatan pemeliharaan oleh masyarakat Desa Bareng bisa dilihat pada kondisi masjid maupun poskamling masih dalam kondisi yang baik dan sangat layak untuk digunakan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Bareng Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

a. Kendala Internal

1) Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya, sudah sangat baik terbukti dengan partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi dalam pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam setiap pelaksanaan program-program pembangunan. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bareng selain dilakukan dalam sebuah rapat pertemuan dan musyawarah (rembug desa) juga dilakukan pada saat Kepala Desa Bareng melakukan kunjungan ke wilayah lingkungan RT/RW.

Sehingga diharapkan dengan terjalannya komunikasi yang baik, maka Kepala Desa Bareng akan lebih mengerti kepentingan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, kaitannya dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng.

2) Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Model kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin di dalam memimpin warganya maupun di dalam mengupayakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat yang akan diberikan terhadap pembangunan di desanya. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Bareng adalah gaya kepemimpinan demokratis karena pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif, hal ini dimaksudkan agar terwujud kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

b. Kendala Eksternal

1) Kecenderungan Masyarakat Untuk Menunggu Bantuan

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan adanya bantuan dan dari Pemerintah Kabupaten Jombang berupa ADD tersebut telah mendukung dan membantu pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Bareng. Namun, di sisi lain, dengan adanya bantuan tersebut telah membuat sebagian masyarakat menjadi mempertimbangkan bantuan atau sumbangan apa yang akan diberikan untuk pembangunan di desanya karena masyarakat lebih cenderung untuk menunggu bantuan dana dari Pemerintah. Kecenderungan berpikir seperti ini muncul karena dengan adanya ADD tersebut telah membuat masyarakat jadi menggantungkan dalam hal pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bareng. Masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa pembangunan di desa mereka sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah, padahal maksud dari ADD itu sendiri ialah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, jadi tidak sepenuhnya hanya untuk pembangunan fisik desa saja.

2) Tingkat Pendapatan Masyarakat

Hambatan yang sering dihadapi dalam suatu kegiatan yaitu kurangnya dana yang diperlukan untuk jalannya proses kegiatan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bareng, masyarakat Desa Bareng sangat antusias sekali dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya, mereka akan mengerahkan segala

tenaga dan pikirannya untuk suksesnya pembangunan tersebut, namun jika diperlukan sumbangan dana yang sedikit besar, hal ini akan sulit bagi sebagian masyarakat Desa Bareng. Keadaan seperti ini bisa dipahami mengingat tingkat pendapatan masyarakat Desa Bareng yang sebagian besar masih rendah, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Bareng adalah sebagai petani atau bahkan buruh tani, yang mana upah sebagai buruh tani hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, diharapkan bagi masyarakat Desa Bareng yang mempunyai tingkat ekonomi yang baik diharapkan memberikan sumbangan yang lebih baik untuk menutupi kekurangan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat yang kurang mampu, dengan begitu kekurangan dana untuk pembangunan desa dapat tertutupi.

3) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Faktor penghambat bagi Kepala Desa Bareng di dalam menyampaikan informasi dan program-program pembangunan kepada masyarakat desa yang seringkali dihadapi yaitu faktor rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang rendah seperti ini, menjadikan hambatan kepada Kepala Desa Bareng di dalam penyampaian setiap informasi dan program-program pembangunan, mereka kurang tanggap, tidak cepat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Bareng. Oleh karena itu diharapkan agar warga masyarakat saling melengkapi, maksudnya disini ialah untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi diharapkan agar dapat membantu upaya Kepala Desa di dalam menyampaikan informasi tentang program-program pembangunan kepada masyarakat yang berpendidikan rendah, karena mereka lebih cepat mengerti dan memahami tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi yang enggan melakukan pekerjaan kasar, diperlukan pendekatan oleh Kepala Desa kepada mereka dengan memberikan pengertian dan arahan bagaimana pentingnya partisipasi tenaga mereka dalam kegiatan pembangunan seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah dalam membangun desa, hal ini

dilakukan agar masyarakat yang berpendidikan tinggi menjadi termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa demi terwujudnya tujuan bersama masyarakat untuk kemajuan desa.

Kesimpulan

Hasil penelitian di Kantor Kepala Desa Bareng, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa yang merupakan administrator pemerintah, administrator masyarakat dan administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan Kepala Desa yang cakap, jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten Jombang yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan bantuan ini dapat membantu terlaksananya pembangunan desa dalam hal pembiayaan atau pembangunan.
3. Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan desa, khususnya dalam bentuk swadaya uang. Seperti yang ada di Desa Bareng dimana tingkat pendapatan masyarakatnya masih rendah, hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi yang mereka berikan dalam bentuk swadaya uang, yang mana tingkat partisipasinya masih rendah atau kurang.
4. Pendidikan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana masyarakat yang berpendidikan tinggi dapat membantu memudahkan upaya Kepala Desa dalam menyampaikan informasi tentang program pembangunan, dan di sisi lain masyarakat berpendidikan rendah sangatlah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam hal partisipasi dalam bentuk tenaga.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2006) **Membangun Desa Partisipatif**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Departemen Dalam Negeri. (1996) **Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa**. Jakarta: Penebar Swadaya.

- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. (1994) **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Siagian, SP. (2007) **Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya**. Jakarta: Bumi Aksara
- (2003) **Filsafat Administrasi**. Jakarta: Bumi aksara
- Tjokroamidjojo, B. (1995) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta: LP3ES.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.